

Implementasi Pendidikan Demokrasi di Sekolah

Muhammad Sobri^{1*}, Umar²

^{1,2}Universitas Mataram

Email: muhammad.sobri@unram.ac.id^{1*}, umarelmubaraq90@unram.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara lebih komprehensif tentang pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode telaah pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Data-data yang diperoleh dituangkan ke dalam sub bab-sub bab sehingga menjawab rumusan masalah penelitian. Proses pengambilan data dilakukan dengan 1) memiliki ide umum mengenai topik penelitian. 2) mencari informasi yang mendukung topik. 3) Pertegas fokus penelitian. 4) Mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan dan mengklasifikasikan bahan bacaan. 5) membaca dan membuat catatan penelitian. 6) Mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan. 7) Mengklasifikasi lagi bahan bacaan dan mulai menulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Hasil kajian menyimpulkan bahwa: a) penanaman nilai demokrasi pada level kelas memerlukan iklim kelas yang transparan dan toleran dalam segala perbedaan, baik sikap maupun pendapat dari siswa; b) nuansa demokrasi dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan dengan mengembangkan dan menggunakan model-model pembelajaran semisal model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis masalah (PBM); c) Iklim yang demokratis dalam aspek kelembagaan di sekolah dapat diakomodir oleh manajemen berbasis sekolah (MBS); d) internalisasi nilai-nilai demokrasi di sekolah tergantung dari kultur sekolah.

Kata kunci: *Demokrasi, Pendidikan, Sekolah.*

Abstract

This study aims to examine more comprehensively the implementation of democratic education in schools. The research method used in this research is the literature review method. The type of data used is secondary data. Methods of data collection by taking data in libraries, reading, taking notes, and processing research materials. The data obtained is poured into sub-chapters so as to answer the formulation of research problems. The data collection process is carried out by 1) having a general idea of the research topic. 2) looking for information that supports the topic. 3) Confirm the focus of the research. 4) Search for and find the required reading material and classify reading materials. 5) read and take research notes. 6) Reviewing and enriching reading material. 7) Reclassify reading material and start writing. The data analysis technique used is content analysis. The results of the study concluded that: a) planting democratic values at the class level requires a class climate that is transparent and tolerant of all differences, both attitudes and opinions of students; b) democratic nuances in learning activities can be realized by developing and using learning models such as cooperative learning models, problem-based learning models (PBM); c) A democratic climate in the institutional aspect of schools can be accommodated by school-based management (SBM); d) internalization of democratic values in schools depending on the school culture.

Keywords: *Democracy, Education, School*

PENDAHULUAN

Era reformasi Indonesia, merupakan era baru di mana perubahan-perubahan di segala bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi, tak terkecuali bidang pendidikan. Keadaan demikian adalah eksekusi dari pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter dalam kepemimpinan negara. Segala bidang baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan diatur sedemikian rupa oleh pusat dengan cara represif.

Pendidikan sebagai ujung tombak pembangunan seolah menjadi mati kutu. Pendidikan seharusnya mengedepankan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan penjejalan doktrin-doktrin tertentu demi melanggengkan kekuasaan. Hal tersebut sejalan dengan cara orde baru mengimplementasikan kurikulum 1984 dan 1994, di mana penggunaan buku-buku teks sekolah dijadikan alat doktrinisasi. Artinya, bahwa keberadaan buku-buku tersebut hanya memuat informasi yang dibuat-buat, dan memanipulasi kenyataan yang ada dalam masyarakat. Demikian pula bagaimana ketika pemerintah mewajibkan penataran P4, keberadaannya tidak mengubah menjadi "cinta", namun, semakin "sinis" (Zamroni, 2007:162). Matinya kebebasan berpendapat, berkreasi, dan mengembangkan pemikiran dalam pendidikan tentu saja bertentangan dengan bentuk sistem demokrasi Pancasila yang dijalankan bangsa Indonesia.

Realitas lain dari demokrasi di Indonesia menunjukkan belum sepenuhnya menjadi suatu kesadaran dan mentalitas. Sikap masyarakat terhadap masalah kebebasan dan toleransi antara umat beragama yang terjadi masih jauh dari sikap demokratis, begitu pula timbulnya kekerasan politik yang terjadi di masyarakat untuk menyelesaikan masalah, seperti menganggap perbedaan sebagai konflik, cara bersikap dan bertindak secara totaliter, berperilaku anarkis (Zamroni, 2001: xiii). Oleh karena itu, untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, perlu adanya internalisasi nilai-nilai demokratis dalam pendidikan, khususnya pada pendidikan formal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode telaah pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Data-data yang diperoleh dituangkan ke dalam sub bab-sub bab sehingga menjawab rumusan masalah penelitian. Proses pengambilan data dilakukan dengan 1) memiliki ide umum mengenai topik penelitian. 2) mencari informasi yang mendukung topik. 3) Pertegas fokus penelitian. 4) Mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan dan mengklasifikasikan bahan bacaan. 5) membaca dan membuat catatan penelitian. 6) Mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan. 7) Mengklasifikasi lagi bahan bacaan dan mulai menulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi untuk menjaga proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi misinformasi maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka serta memperhatikan komentar pembimbing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan, demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Sebagai konsep berbicara mengenai arti, makna dan sikap perilaku yang tergolong demokratis, sedang sebagai praksis

sesungguhnya demokrasi sudah menjadi sistem. Tugas seorang pendidik adalah mensosialisasikan dua tataran tersebut dalam konsep dan fraksisnya, sehingga peserta didik memahami dan ikut terlibat dalam kehidupan demokrasi.

Menurut *Wikipedia, the free encyclopedia* sebagaimana yang dikutip oleh Zamroni (2011: 25) menjelaskan bahwa pendidikan demokrasi merupakan suatu teori pembelajaran dan pengelolaan sekolah yang memberikan kesempatan bagi siswa dan guru serta staf administrasi untuk berpartisipasi secara bebas dan setara dalam kegiatan sekolah. Pada suatu sekolah yang demokratis, pengambilan keputusan melibatkan orang-orang yang terkena oleh keputusan tersebut.

Berdasarkan makna pendidikan demokrasi tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa aspek dalam pendidikan demokrasi, antara lain, pertama, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi sekolah/daerah tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat tanpa harus kehilangan orientasi nasional dan global. Kurikulum menggariskan adanya mata pelajaran yang menggiring suasana demokratis dalam proses belajar mengajar dan pada gilirannya dapat menanamkan nilai-nilai demokratis pada diri anak didik.

Kedua, sekolah diberikan kebebasan dalam menggunakan bahan materi, tidak ada keharusan bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk menggunakan bahan belajar tertentu. Idealnya diberi kebebasan memilih sendiri bahan belajar (buku dan media) yang mereka nilai baik. Bahan belajar sendiri dikemas dengan mengakui bahwa setiap siswa berbeda satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangannya memungkinkan adanya interaksi aktif dan menempatkan sasaran didik sebagai subyek bukan obyek pendidikan.

Ketiga, pendidikan demokrasi memberikan pelayanan yang optimal kepada para siswa. Guru dan staf sekolah harus bersikap demokratis dengan mensikapi dan menerima perbedaan, menghargai pendapat siswa tidak memaksakan kehendak, dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. Selanjutnya sarana prasarana pendidikan menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam praktek pendidikan atau belajar mengajar. Misalnya: perpustakaan kelas maupun perpustakaan sekolah hendaknya menjadi bagian yang menyatu dengan proses belajar mengajar di kelas. Sebagai individu anak hendaknya memiliki berbagai kebutuhan, maka sekolah atau lembaga pendidikan haruslah mampu memberikan lingkungan belajar yang bisa memenuhi kebutuhan biologis (makanan, minuman, rasa aman dan tempat istirahat), kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial (komunikasi dan interaksi dengan sesama manusia).

Keempat, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan yang jelas, tidak hanya sekedar pelengkap dalam program sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler diarahkan untuk membina jiwa kepemimpinan, kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dan kemampuan dalam bekerjasama dengan orang lain dan memecahkan masalah secara aman dan damai.

Kelima, adanya keterlibatan atau partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan sekolah. Sekolah membuka kesempatan dan memberikan kebebasan serta mendorong semua pihak yang berkepentingan atau *stakeholders* untuk terlibat mengambil keputusan dalam pengelolaan sekolah, terutama siswa dan orang tua siswa. orang tua siswa tidak hanya ikut berpartisipasi dalam membayar uang semester atau SPP tetapi juga terlibat dalam merancang kurikulum dan segala program yang ada di sekolah.

Tujuan Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara. Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan

demokrasi adalah bagian dari sosialisasi politik negara terhadap warganya. Sesuai dengan makna pendidikan sebagai proses yang sadar dan terencana, sosialisasi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi secara baik khususnya melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dalam hal ini sekolah, berperan penting dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Sistem persekolahan memiliki peran penting khususnya untuk kelangsungan sistem politik demokrasi melalui penanaman pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi.

Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru pengetahuan dan kesadaran akan tiga hal, antara lain: Pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Kedua, demokrasi adalah suatu proses pembelajaran yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan dan keadilan serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis (Zamroni, 2001: 17).

Tujuan pendidikan demokrasi yang dijelaskan di atas, selaras dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dalam pasal 3 yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Urgensi Pendidikan Demokrasi

Urgensi pendidikan demokrasi di sekolah merupakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan dengan adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.

Pendidikan demokrasi dilaksanakan tidak hanya berdampak pada kehidupan kelas dan sekolah yang lebih kondusif terlaksananya pembelajaran yang bermakna, namun juga merupakan wahana bagi siswa mempraktekkan kehidupan yang demokratis. pengalaman inilah yang sangat penting kelak akan digunakan oleh para siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Zamroni, 2011: 27). Pendidikan demokrasi juga menjadi hal yang penting untuk diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran dan pengelolaan sekolah karena sejalan dengan semangat reformasi yang semakin demokratis serta didukung dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menegaskan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Poin penting dalam ayat ini adalah penegasan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, artinya, bahwa keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat. Bersama dengan itu pula dalam pasal 9 dinyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Keikutsertaan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan mereka dalam komite sekolah atau dewan pendidikan daerah. Komite sekolah berhak ikut serta dalam merumuskan perencanaan pendidikan,

tidak saja dalam perencanaan makro tapi sampai pada kebijakan restrukturisasi kurikulum.

Pendidikan Demokrasi di Sekolah

Kehidupan dalam sekolah sarat dengan keragaman dan interaksi. Siswa yang datang ke sekolah berasal dari latar belakang yang beragam. Para guru memiliki mitra-mitra kolaborasi yang beragam baik dari kalangan akademisi, pelaku industri, pelaku pemerintahan. Para guru dan siswa di sekolah juga berinteraksi dengan para alumni yang tersebar di berbagai perusahaan swasta dan organisasi. Dengan kondisi-kondisi seperti itu, sekolah dapat menjadi sebuah wadah yang konstruktif bagi pembelajaran demokrasi dan pengembangan kehidupan kolektif yang demokratis, yaitu sekolah sebagai 'laboratorium demokrasi'.

Pendidikan demokrasi diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan sosial sehingga menjadi warga negara yang baik dengan ciri-cirinya antara lain: berani mengambil sikap positif untuk menegakkan pilar-pilar demokrasi demi masa depan bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesatuan, kebangsaan, kebhinekaan, multikultural, nasionalisme, demokrasi.

Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah bagaimana mewujudkan pendidikan yang demokratis dalam pendidikan formal terutama di sekolah, baik dalam level kelas dan sekolah?. Penanaman nilai demokrasi pada level kelas memerlukan iklim kelas yang transparan dan toleran dalam segala perbedaan, baik sikap maupun pendapat dari siswa. Iklim kelas yang terbuka dan longgar sangat kondusif untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, sebab dalam iklim seperti itu suasana akan bersifat demokratis sehingga proses belajar akan dinamis.

Terkait dengan iklim kelas, ada dua macam iklim kelas yakni demokratis dan tidak demokratis. Zamroni (2011) menjelaskan bahwa parameter iklim kelas yang demokratis mencakup: (1) seluruh warga kelas memiliki kesempatan yang sama dan setara; (2) perspektif yang berbeda-beda merupakan sesuatu yang memperlengkap kehidupan bersama dalam kelas; (3) semua kemungkinan yang berkaitan dengan pemenuhan ketertarikan warga kelas harus disampaikan secara jelas kepada seluruh warga kelas; (4) dan warga kelas mampu membangun asosiasi atau kelompok yang tidak terbatas di kelas bahkan melewati sekolah. Sebaliknya, kelas yang tidak demokratis memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) iklim kelas kaku dan otoriter; (b) aktivitas siswa pasif, dan waktu didominasi oleh guru; (c) kesempatan diskusi terbatas, dan tidak pernah mendiskusikan permasalahan yang bersifat kontroversial; (d) kesempatan warga kelas untuk mengambil keputusan sangat terbatas atau bahkan tidak ada; (e) warga kelas sering mengeluh tanpa ada upaya mencari solusi dari persoalan yang ada.

Kegiatan pembelajaran di kelas perlu dimodifikasi sedemikian rupa supaya nuansa demokrasi lebih tertanam dan kondusif. Jadi, guru harus kreatif dalam menggunakan strategi atau model pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengangkat topik atau permasalahan yang bersifat kontroversial untuk memancing daya pikir kritis siswa dan memberikan ruang kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk berpartisipasi mengungkapkan pendapatnya serta mengakomodir segala perbedaan pada saat berlangsung pembelajaran dengan toleran dan egaliter. Nuansa demokrasi dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan dengan mengembangkan dan menggunakan model-model pembelajaran semisal model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis masalah (PBM).

Pendidikan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, tetapi juga berkaitan dengan keseluruhan dimensi pendidikan termasuk aspek kelembagaan. Dalam kerangka

kelembagaan, sebuah sekolah layak disebut sebagai sekolah yang demokratis jika memiliki ciri-ciri: Pertama, manajemen selalu berdasarkan kesepakatan. Apapun program yang hendak dikembangkan dan diimplementasikan harus didasarkan pada kesepakatan seluruh komponen yang ada dalam sekolah. Kedua, pendekatan demokratis layak untuk organisasi dengan para anggota dari kalangan profesional, yakni mereka yang memiliki kemampuan secara teknis dan keterampilan serta memiliki otoritas dalam keahliannya. Ketiga, penanaman nilai, kultur dan kebiasaan-kebiasaan dalam organisasi dilakukan oleh anggota organisasi yang sudah dimulai sejak dalam fase pendidikan dan tahun-tahun pertama berkerja. Keempat, pengambilan keputusan tentang berbagai kebijakan penting dilakukan oleh sebuah komite dan tidak dilaksanakan secara individual oleh kepala sekolah dengan otoritas kepemimpinannya. Kelima, semua keputusan ditetapkan dengan cara konsesus atau kompromi dan sedapat mungkin dihindari polarisasi organisasi karena perbedaan pendapat.

Beanedan Apple (1995) sebagaimana yang dikutip oleh Rosyada (2004:16) mengemukakan bahwa kondisi yang sangat perlu dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis adalah sebagai berikut: (a) Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin. (b) Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah. (c) Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah. (d) Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik. (e) Ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas. (f) Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup manusia. (g) Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengembangkan cara-cara hidup demokratis

Iklim yang demokratis dalam aspek kelembagaan di sekolah dapat diakomodir oleh manajemen berbasis sekolah (MBS), yakni model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar pada pihak sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, murid, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua murid, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah berdasarkan kebijakan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Veithzal & Sylviana (2009: 163) esensi dari manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah otonomi, fleksibilitas, dan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat dimaknai sebagai kewenangan/ kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya dan merdeka/ tidak bergantung. jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai peraturan pendidikan yang berlaku.

Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan-keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah, maka akan sekolah akan lebih lincah dan tidak harus menunggu arahan dari atasan untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya yang ada. Dengan cara ini, sekolah akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi.

Peningkatan partisipasi merupakan penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, di mana warga sekolah (guru, murid, karyawan) dan masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi

pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai "rasa memiliki" terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah.

Hal yang perlu diperhatikan adalah Internalisasi nilai-nilai demokrasi di sekolah tergantung dari kultur sekolah. Kultur merupakan sistem keyakinan dan sistem nilai-nilai yang ada dikelompok warga sekolah termasuk semboyan-semboyan yang dimiliki. kultur sekolah tidak terlepas dari adanya perubahan-perubahan yang disesuaikan perubahan zaman yang begitu cepat. oleh karena itu, perlu dikembangkan berdasarkan strategi yang tepat. Menurut Zamroni (2011), ada beberapa strategi untuk membangun kultur sekolah yang tepat, antara lain: (1) tujuan, sasaran dan target yang akan dicapaidari pengembangan kultur sekolah harus jelas dan kongkrit, (2) pengembangan kultur sekolah akan lebih efektif dan efisien kalau dikerjakan dengan cara bekerja sama antara sekolah dan orang tua siswa, (3) menyadarkan pada semua guru akan peran yang penting dan bertanggung jawab dalam keberhasilan melaksanakan dan mencapai tujuan pengembangan kultur sekolah, (4) menyadarkan bahwa guru memiliki "*hidden curriculum*" sebagai instrumen yang cukup penting dalam mengembangkan kultur sekolah, (5) pada proses pelaksanaan pembelajaran, guru menekankan daya kritis siswa, kemampuan kerjasama, dan keterampilan dalam mengambil keputusan, (6) kultur sekolah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi siswa, (7) salah satu hakekat fase pengembangan kultur sekolah adalah proses pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di sekolah yang dapat dimonitor dan dikontrol oleh kepala sekolah dan guru.

SIMPULAN

Pendidikan demokrasi merupakan suatu teori pembelajaran dan pengelolaan sekolah yang memberikan kesempatan bagi siswa dan guru serta staf administrasi untuk berpartisipasi secara bebas dan setara dalam kegiatan sekolah. Pada suatu sekolah yang demokratis, pengambilan keputusan melibatkan orang-orang yang terkena oleh keputusan tersebut.

Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru pengetahuan dan kesadaran akan tiga hal, antara lain: Pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Kedua, demokrasi adalah suatu proses pembelajaran yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan dan keadilan serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis.

Urgensi pendidikan demokrasi di sekolah tidak hanya dalam rangka menggapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan dengan adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal, namun juga merupakan wahana bagi siswa mempraktekkan kehidupan yang demokratis. pengalaman inilah yang sangat penting kelak akan digunakan oleh para siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Untuk mewujudkan demokrasi, diperlukan usaha mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan formal. Penanaman dan pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan harus terinternalisasi dalam segala dimensi pendidikan baik dalam dimensi pembelajaran maupun kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Dede Rosyada. 2004. *Paradigma pendidikan demokratis*. Jakarta: Prenada Media.

Depdiknas. 2003. *Undang-Undang RI No. 20. Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Veithzal & Sylviana. 2009. *Education management*. Jakarta: PT. RajaGrafinfo Persada.

Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Zamroni. 2007. *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi*. Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah.

Zamroni. 2011. *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.